



LAPORAN

Layanan Informasi Publik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024



Disusun oleh :
TIM PPID BAPPEDA JABAR
Bandung, 2025

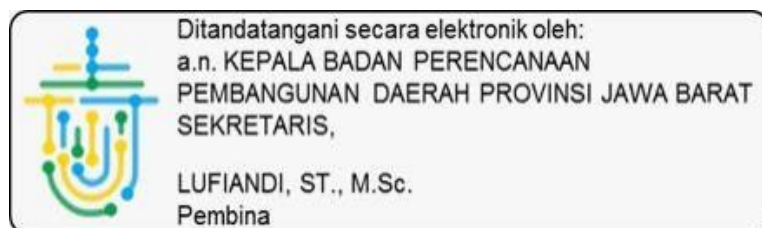
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik.

PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 telah banyak dinamika dan pengembangan yang dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan informasi public dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada public dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Melalui laporan tahunan ini, tidak hanya sekedar melaksanakan amanat Pasal 4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	1
Latar Belakang.....	1
Kebijakan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi.....	1
PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.....	3
Program dan Kegiatan Ppid Pelaksana Bappeda Jabar.....	4
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	6
Fasilitas Desk PPID.....	7
Sarana Bagi Penyandang Disabilitas.....	8
Alur Permohonan Informasi Publik Bappeda Jabar.....	9
Anggaran PPID.....	15
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	15
Kendala Internal dan Eksternal Layanan Informasi Publik.....	17
Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program dan Kegiatan tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar.....	4
Tabel 2	Jumlah Permohonan Informasi.....	10
Tabel 3	Rata-rata waktu menjawab Permohonan Informasi.....	11
Tabel 4	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan, Dikabulkan Sebagian, Ditolak, dan Alasan Ditolak berdasarkan Bulan tahun 2024.....	11
Tabel 5	Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.....	3
Gambar 2	Ruangan Khusus Layanan PPID Bappeda Jabar.....	7
Gambar 3	Backend Office PPID Bappeda Jabar.....	7
Gambar 4	Jalur Khusus untuk Kursi Roda.....	8
Gambar 5	Parkir Khusus Disabilitas.....	6
Gambar 6	Panduan Bahasa Isyarat Abjad.....	6
Gambar 7	Maklumat Pelayanan.....	6

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LATAR BELAKANG

Informasi menjadi kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh setiap orang dalam kegiatan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut selaras dengan pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi serta wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerjanya. Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu prioritas dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 menggambarkan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan ekosistem informasi yang transparan, responsif, dan inklusif. Melalui penilaian kinerja, evaluasi, dan umpan balik masyarakat, laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk terus meningkatkan layanan informasi publik guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin cerdas dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan negara.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki visi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Untuk mencapainya, terdapat 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; serta
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik yang interaktif dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai aturan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225 Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Keputusan Gubernur di atas, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

Atasan PPID Pelaksana adalah Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Biro Umum, dan Direktur pada BUMD. Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

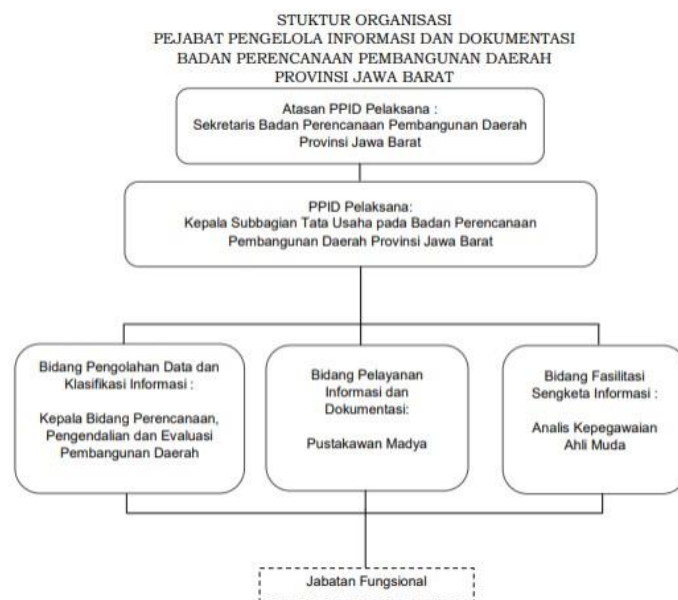
- 1) Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- 3) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama dengan Tim Pelayanan Pertimbangan Informasi.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan pada kategori informasi publik sebagaimana komitmen dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi public. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan tugasnya pada tahun 2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3676/KPG.03.01.01/Kepegumhum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2023. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu didukung oleh Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi, Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Tim Fasilitasi Sengketa Informasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tugas dan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan pimpinan.
4. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
5. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
6. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana;
7. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.
9. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pelaksana;
10. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
11. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
12. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.




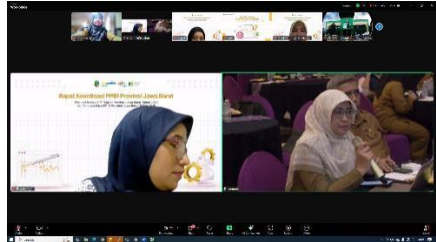
Dalam melaksanakan kewajiban sebagai badan publik, PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pelaksana senantiasa mengedepankan kemudahan akses terhadap informasi publik. Layanan permohonan Informasi dapat diakses secara langsung oleh publik melalui desk pelayanan informasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau dapat menyampaikan permohonan secara elektronik melalui email bappeda@jabarprov.go.id maupun media social official Bappeda Jabar.



PROGRAM DAN KEGIATAN PPID PELAKSANA BAPPEDA JABAR

Terdapat beberapa program dankegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Jabar pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Program dan Kegiatan tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Keterangan
	Rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Sosialisasi Internal	1X	Kegiatan rapat, koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID di lingkup internal PPID Bappeda Jabar

<p>Koordinasi PPID Jawa Barat</p>	<p>4x</p>	<p>Rabu, 17 Januari 2024, Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat Seri 1 Tahun 2024 secara daring.</p>  <p>Selasa, 23 Juli 2024, Sosialisasi E-Monev KIP Jabar oleh Komisi Informasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka - Gedung Yudha Karya Abdi Negara.</p>  <p>Selasa, 10 Desember 2024, di Hotel Holiday Inn Pasteur, membahas Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas.</p>  <p>Senin, 23 Desember 2024, secara daring megikuti Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat</p> 
<p>Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan</p>		<p>Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan bersama PPID Utama. Dilaksanakan Pada 14 Agustus 2024, Di Hotel Grand Sunshine.</p>

			
	<p>Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Jawa Barat tahun 2024</p>		<p>Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se Jawa Barat tahun 2024 yang mencakup tahapan pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire), verifikasi data, presentasi, penilaian, dan penganugerahan</p> 

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Bappeda Jabar dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 2193/Hk.02/Diskominfo Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPID Bappeda Jabar melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin–Kamis dan pukul 09.00 hingga pukul 15.00 pada Hari Jumat dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 13.00 . Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi 12 (dua belas) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bappeda Provinsi Jawa Barat guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email bappeda@jabarprov.go.id, serta laman permohonan informasi PPID pada website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (<http://bappeda.jabarprov.go.id/>).

Fasilitas Desk PPID

Ruang PPID terletak di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung. Ruang layanan dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima pemohon data.



Gambar 2. Ruangan Khusus Layanan PPID Bappeda Jabar

Pengelolaan layanan informasi dilakukan dalam Ruang Humas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat , Gedung Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2. Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim Pengelola PPID.



Gambar 3. Backend Office PPID Bappeda Jabar

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Surat Keputusan, Daftar Informasi Publik, dan SOP Permohonan Data Layanan Informasi PPID.

Sarana Bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 4. Jalur Khusus untuk Kursi Roda



Gambar 5. Parkir Khusus Disabilitas



Gambar 6. Panduan Bahasa Isyarat Abjad



Gambar 7. Maklumat Pelayanan

Untuk mendukung sarana yang inklusif, Bappeda Jabar menyediakan jalur khusus kursi roda bagi pengunjung berkebutuhan khusus. Selain pelayanan informasi yang dilakukan secara langsung, permohonan informasi juga dilakukan melalui media elektronik, diantaranya:

1. Surat elektronik yang ditujukan ke alamat email bappeda@jabarprov.go.id permohonan informasi publik secara online melalui layanan PPID pada website bappeda.jabarprov.go.id;
2. Layanan Informasi dapat diakses melalui media sosial official Instagram: @bappedajabar , X: @bappedajabar , Youtube: BappedaJabar , Facebook: Bappeda Provinsi Jawa Barat , dan Tiktok : @bappedajabar

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA JABAR

Langkah 1: Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :

- a. Individu : KTP/ SIM/ Paspor
- b. Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
- c. Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
- d. KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum AD/ART Organisasi

Langkah 2 : Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi.

Langkah 3: Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan

Langkah 4: Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan

Langkah 5: Pemohon menunggu proses permohonan selama maksimal 10 hari kerja. PPID berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun keputusan terkait permohonan informasi tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Langkah 6 Pemohon mendapatkan pemberitahuan mengenai ketersediaan informasi dan mendapatkan surat keputusan PPID terkait informasi yang dimohonkan

ANGGARAN PPID

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik pada Bappeda Jabar dianggarkan anggaran publikasi dengan rincian sebagai berikut:.

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan						Rp20.000.000
	[#] Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp20.000.000
	[-] Kegiatan Prioritas Lainnya						
	Publikasi di Televisi Spesifikasi : Tv Daerah	2 Kali	Tayang	10.000.000	0		Rp20.000.000
	Publikasi di Media Cetak Regional Spesifikasi : Publikasi di Media Cetak dengan total produksi 32.000 eksemplar per hari	2 Kali	Per Seperempat Halaman	63.250.000	0		Rp126.500.000
	Radio Talkshow Daerah Spesifikasi : Radio Talkshow Daerah	2 Per Tayang	Tayang	5.000.000	0		Rp10.000.000

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama periode tahun 2024, Bappeda Jabar terus aktif melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang meminta informasi seputar informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Bappeda Jabar tahun 2024, terdapat 45 (empat puluh lima) permohonan informasi publik yang terdaftar. Seluruh permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Bappeda Jabar ditanggapi dengan baik di mana pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori individu. Berikut merupakan rinciannya:

Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Pemohon	
		Individu	Badan Hukum
Januari	4	4	0
Februari	4	4	0
Maret	1	1	0
April	6	6	0
Mei	4	4	0
Juni	5	3	2
Juli	5	5	0
Agustus	2	1	1
September	5	4	1
Oktober	5	5	0
November	2	2	0
Desember	2	2	0
Total	45	41	4

Berdasarkan table diatas, selama tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar menerima 45 permohonan resmi yang terdaftar melalui desk PPID. Adapun pemohon yang melakukan permohonan informasi didominasi oleh individu/perorangan sebanyak 41 orang dengan rata-rata kebutuhan untuk penelitian tugas akhir maupun tugas kuliah.

Tabel 3. Rata-rata waktu menjawab Permohonan Informasi

Bulan	Jumlah Waktu Menjawab (hari)
Januari	2
Februari	1
Maret	2
April	3
Mei	2
Juni	4
Juli	1
Agustus	2
September	1
Oktober	2
November	1
Desember	1
Total	22
Rata-rata	3,14

Berdasarkan table 3, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PPID Pelaksana Bappeda Jabar untuk menjawab permohonan informasi yang masuk melalui desk PPID adalah 3,14 hari.

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan, Dikabulkan Sebagian, Ditolak, dan Alasan Ditolak berdasarkan Bulan tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Permohonan			Alasan Ditolak
		Dikabulkan	Sebagian	Ditolak	
Januari	4	4	0	0	-----
Februari	4	4	0	0	--
Maret	1	1	0	0	-
April	6	6	0	0	
Mei	4	4	0	0	
Juni	5	5	0	0	
Juli	5	5	0	0	
Agustus	2	2	0	0	
September	5	5	0	0	
Oktober	5	5	0	0	
November	2	2	0	0	
Desember	2	2	0	0	
Total	45	45	0	0	

Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa PPID Pelaksana Bappeda Jabar memenuhi seluruh permohonan informasi terdaftar. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan data yang dapat difasilitasi oleh internal Bappeda Jabar sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi.

Tabel 5. Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
		KI	PTUN	MA
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel 5 Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024 Bappeda Jabar tidak mendapatkan permohonan keberatan atas informasi dari pemohon.

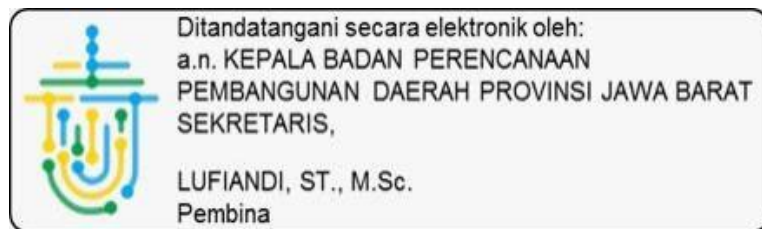
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal yakni disposisi permohonan informasi terkadang langsung ke bidang terkait dan tidak melalui PPID, sehingga tanggal pemebrian informasi ada yang tidak tercatat.
2. Koordinasi antar bidang masih belum optimal untuk menjawab permohonan data dikarenakan keterbatasan wewenang.
3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
4. Hambatan Eksternal yaitu terdapat pemohon informasi yang memberikan surat tidak melalui PPID sehingga PPID mengalami kendala untuk menghubungi pemohon informasi karena data yang diberikan tidak lengkap.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

1. Dibutuhkan koordinasi dan bimbingan lebih intensif dengan PPID Utama, sehingga siap melakukan pelayanan informasi publik dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasaranan yang ada.
2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada diklat kehumasan.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



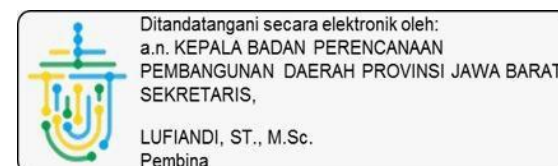
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	4	2	4	0	0	0	0	0	
2	Ferbruari	4	1	4	0	0	0	0	0	
3	Maret	1	2	1	0	0	0	0	0	
4	April	6	3	6	0	0	0	0	0	
5	Mei	4	2	4	0	0	0	0	0	
6	Juni	5	4	5	0	0	0	0	0	
7	Juli	5	1	5	0	0	0	0	0	
8	Agustus	2	2	2	0	0	0	0	0	
9	September	5	1	5	0	0	0	0	0	
10	Oktober	5	2	5	0	0	0	0	0	
11	November	2	1	2	0	0	0	0	0	
12	Desember	2	1	2	0	0	0	0	0	
TOTAL		45	22	45	0	0	0	0	0	

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIS,



31	21 Agustus 2024	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	-	082115570852 / 0895422513750	Konsultan	Data terkait tutupan lahan Provinsi Jawa Barat (format SHP)	Kajian	√				√	√	√				Senin, 26 Agustus 2024		
32	2 September 2024	Universitas Muhammadiyah Bandung	Puteraco Gading Permai A No. 1 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Canguang Kec. Rancaekek	085860795346	Mahasiswa	Data dan Informasi Menengenai Stunting	Delegasi Siap Jabar											Senin, 9 September 2024		
33	3 September 2024	Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia FIM PII Cabang Sukabumi	Sukabumi	08184277223	Konsultan	Data Demografi, Data Ekonomi, Data Infrastruktur	Riset													
34	3 September 2024	Delfy Regita Cahyani / Universitas Muhammadiyah Bandung	Dsn Malausma Kidul Rt. 001/001 Desa Malausna Kec. Malausma Kab. Majalengka	081322725662	Mahasiswa	Public Private Partnership dalam pembangunan TPPAS Legok Nangka Kecamatan Nagreg Kab. Bandung Jawa Barat	Skripsi	√				√	√	√				Senin, 9 September 2024		
35	19 September 2024	Nur Hakimatu Shalwa / STIA LAN Bandung	Jl. hayam Wuruk No. 34-38 Bandung	089682361774	Mahasiswa	Rencana Strategis, SAKIP dan LAKIP	Tugas Kuliah											Rabu, 25 September 2024		
36	2 September 2024	Rr Tini Anggraeni/ IPB	Jl. H. Saiyan No. 33 Kav. A1, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang	08122326317	Mahasiswa	wawancara dan pengumpulan data terkait Jaring Pengaman Sosial dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat	Tesis	√				√	√					Selasa, 17 September 2024		
37	2 Oktober 2024	Anugrah Ambia/ Mutia Nur Kholila / ITB	Jl. Cisit Indah VI No. 271	081221643468	Mahasiswa	Permohonan Kebutuhan Data Sekunder	Tugas Kuliah	√				√								
38	7 Oktober 2024	Emyr Hidayat / BBWS Ciliwung Cisadane	Jl. Inpeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Cipinang Melayu, Kec. Makassar	082244822485	PNS	Data RTRW Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Shp	Evaluasi Rencana PengelolaanS DA Ciliwung Cisadane	√				√						Rabu, 9 Oktober 2024		

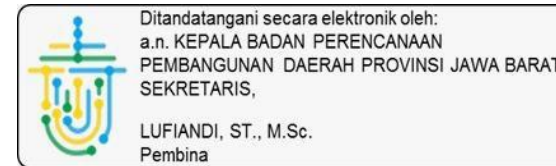
REGISTRASI KEBERATAN TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	No. Pendaftaran Permintaan Informasi	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan pengajuan keberatan	Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
NIHIL												

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIS,

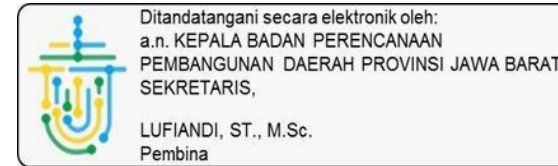


LAPORAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tanggal	No. Registrasi	Pemohon	Termohon	Keterangan
NIHIL					

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
					CETAK	DIGITAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BAGIAN SEKRETARIAT								
Sekretaris : Lufiandi, ST., M.Sc								
1	RENSTRA Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Tahun 2024, Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
2	RENJA Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Tahun 2024, Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	BK
3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Tahun 2022, Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	SS
4	Dokumen LKPJ	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	SS

5	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-	√	aktif Selama Masih Berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat musnah	BK
6	Alamat Unit Satuan kerja pejabat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-	√	aktif Selama Masih Berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat musnah	BK
7	Visi Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru, 3 tahun inaktif sifat permanen	BK
8	Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah peaturan tidak berlaku(UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
9	Profil Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru, 3 tahun inaktif sifat permanen	BK

10	Bagan struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2024, Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP), 3 tahun inaktif (UK) permanen	BK
11	Profil singkat pejabat struktural Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP), 3 tahun inaktif(UK), sifat permanen	BK
12	Denah Kerja Gedung Bappeda	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2021, Bandung	-		Selama Masih Dimiliki (Arsip Vital) Permanen	BK
13	Majalah warta Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2020, Bandung	-	√	1 tahun aktif (UK), 3 tahun inaktif (UK), sifat musnah kecuali	BK
14	SK PPID Pembantu Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan 8 Tahun sifat Musnah, Kecuali Eselon I dan II Permanen	BK

15	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	√	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali	SS
16	Agenda Kerja pimpinan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	SS
17	Laporan Kearsipan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai aktif, 3 tahun inaktif sifat dinilai kembali	SS
18	Daftar buku perpustakaan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan	Tahun 2023, Bandung	-	√	2 tahun pembaharuan data aktif (UP) 3 tahun inaktif (UK) sifat permanen	BK
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA								
Kepala Bidang : Ane Carolina, S.Si., M.Eng								
1	Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Reformasi Birokrasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 1		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8	BK

							tahun inaktif (UK), sifat permanen	
2	Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 1		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
3	Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 1		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
4	Kajian Desain Penataan Daerah Tahun 2025	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 1		√	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UK), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen	BK
5	Kajian Wahana Lansia Sejahtera	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 2		√	√	2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP),	BK

							3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	
6	Kajian Kawasan Ramah Lansia Jawa Barat	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 2		√	√	2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	BK
7	Background Study RPJMD 2018 - 2023 Sektor Ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 2		-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
8	Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Kesehatan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 2		-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
9	Background Study RPJMD 2018 - 2023 Sektor Pendidikan	Kepala Bidang Pemerintahan dan	Kepala Sub Bidang PPM 3		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan	BK

		Pembangunan Manusia					Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	
10	Background Study RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 3		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
11	Background Study RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Sub Bidang PPM 3		√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
Kepala Bidang : Afriyani Amran, S.T., M.T.								
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2017	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)

2.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2019	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
3.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Tahun 2019	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2018	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
4.	RPD 2024-2026	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2023	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
5.	RPJPD 2005-2025	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2004	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)

6.	RPJPD 2025-2045	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2024	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
7.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2020	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
8.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2021	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
9.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2022	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)

10.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2023	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
11.	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bandung, 2024	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	BK (Berkala)
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN								
Kepala Bidang : Gunawan, ST., MT								
1	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat (Perda no. 22 Tahun 2010)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah kegiatan selesai (UP) 3 tahun inaktif (UK) sifat Permanen	SS
2	Memorandum of Understanding Bappeda Prov. Jawa Barat	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang fisik	-	-	√	2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UP) sifat Permanen	SM

3	Daftar Hasil Kajian di Bidang Fisik (Lebih Detail Tahunnya)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Lingkup	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	SS
4	Background Study RPJMD Tahun 2017 Sektor Sumber Daya Air	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	SM
5	Background Study RPJMD Tahun 2017 Sektor Jalan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	SM
6	Background Study RPJMD Tahun 2017 Sektor Perumahan dan Pemukiman	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	SM
7	Background Study RPJMD Tahun 2017 Sektor	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru	SM

	Lingkungan Hidup						(UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	
8	Background Study RPJMD Tahun 2017 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen	SM
9	Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Tahun 2020 SANGKURIANG	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Sub Bidang Infraswil 1	-	-	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai (UP), 3 Tahun inaktif (UP), sifat Musnah	SM
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM								
Kepala Bidang : Eka Jatnika Sundana, ST., M.Sc								
1	Masterplan Pertanian 2020	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Sub Bidang PSDA 1	-	√	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen	BK
2	Dokumen Pembiayaan Defisit APBD	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Sub Bidang PSDA 3	-	-	√	aktif sampai 5 tahun setelah audit (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	BK

3	Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Daerah	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Sub Bidang PSDA 3		-	√	aktif sampai 2 tahun setelah kegiatan selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK) sifat permanen	BK
---	---------------------------------------	--	--------------------------	--	---	---	---	----

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIS,

